



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

Jalan Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368

Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

RENCANA KERJA (RENJA) 2021



**BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RENJA PD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) di tiap tahun selama 5 (lima) tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 58 Tahun 2017).

Penyusunan Renja PD Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Renja PD Tahun 2021 meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 26 Februari 2020 untuk mendapatkan masukan, usulan, dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah di Jawa Tengah. Dalam forum ini pemangku kepentingan melakukan penajaman target kinerja sasaran, sasaran, program dan kegiatan dalam rancangan Renja PD dengan tujuan menyelaraskan program dan kegiatan antar PD, nasional dan kabupaten/kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja PD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
6. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri PAN dan RB PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan IKU;
 21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 23. Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 24. Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 25. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
 26. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 27. Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
 28. Peraturan Daerah Jateng Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
 32. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0000549 Tahun 2020 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Serta Pedoman Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
 32. Pedoman Penyusunan Renja PD Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya menyusun Renja Perangkat Daerah memiliki tujuan sebagai:

- a. Dokumen perencanaan sebagai penjabaran RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 yang merupakan tahun ke-3 periode Renstra;

- b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2021 sebagai pedoman, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan Renja PD tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

BAB II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020, mengacu pada APBD Tahun 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja PD tahun 2019. Reviu hasil evaluasi dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD; Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci; Prestasi yang dicapai pada Tahun 2019; Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi; Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, penentuan isu-isu strategis terkait dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya; Tujuan dan sasaran Renja sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya; Menguraikan mengenai tantangan dan peluang yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rumusan program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif untuk tahun 2021. Rancangan tersebut dituangkan dalam tabel; Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (termasuk penelaahan dari arahan Gubernur dan hasil reses/aspirasi DPRD).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra PD
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan APBD tahun 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun 2018. Reviu hasil evaluasi, dan realisasi Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya pada tahun 2019, yaitu:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Indikator kinerja program:

- 1.) Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan.
Capaian pada akhir tahun 2019 memenuhi target 93,05%.
- 2.) Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi.
Target capaian pada akhir tahun 2019 tercapai yaitu 69,99%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan mencapai target 100% dari realisasi 3 (tiga) kegiatan yaitu Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat; Pengadaan, Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah; Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik.

b. Program Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakarya.

Indikator kinerja program:

- 1.) Persentase panjang jalan yang dileger.
Mencapai target capaian pada akhir tahun 2019 sebesar 96,30%.
- 2.) Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakarya yang termutakhirkan.
Capaian pada akhir tahun 2019 sudah sesuai target yaitu 100%, merupakan indikator baru yang telah ditetapkan di RPJMD.

Program ini dapat mencapai target 100% didapat dari realisasi 4 (empat) kegiatan yaitu Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan, Keciptakarya; Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi; Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi; Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah.

c. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi.

Indikator kinerja program ada 2 (dua) yaitu:

1.) Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar.

Target capaian di tahun 2019 tercapai dengan nilai capaian 11,17%.

2.) Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi.

Capaian tahun 2019 sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 9,71%.

Indikator kinerja program memenuhi target capaian 100% didapatkan dari realisasi 3 (tiga) kegiatan yaitu: Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah, Pembinaan Jasa Konstruksi, Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

a. Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan.

Indikator kinerja program (*outcomes*):

1.) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor.

Nilai capaian di tahun 2019 adalah 38,41% melebihi target semula yaitu 37,91% dengan tingkat capaian 101,32%. Realisasi capaian pada tahun 2019 meningkat, dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.

2.) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur.

Target capaian untuk tahun 2019 adalah sebesar 35,65%, realisasi capaian di akhir tahun 2019 adalah 36,06% sehingga tingkat ketercapaiannya sebesar 101,15%, melampaui target yang telah direncanakan, dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.

3.) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat.

Realisasi pada akhir tahun 2019 mencapai 40,79% melebihi target semula yaitu 40,18% dengan tingkat capaian 101,52%. Realisasi capaian pada tahun 2019 meningkat, dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.

Program ini memiliki 4 (empat) kegiatan yang memiliki tingkat ketercapaian di atas 100% yaitu: Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1, Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Barat 2, Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan dan

Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 1, Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 2.

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi.

Indikator kinerja program:

- 1.) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik.
Capaian untuk indikator ini pada tahun 2019 adalah 90,69% melebihi target capaian semula 90,20% sehingga tingkat ketercapainnya 100,54%, dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.
- 2.) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik.
Indikator ini melebihi target dan mengalami peningkatan capaian pada tahun 2019 dengan nilai capaian 86,73% melebihi target capaian semula 86,70%, dikarenakan mengoptimalkan kondisi lapangan yang masih memungkinkan.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi mencapai tingkat capaian diatas 100% didapat dari rata-rata realisasi 36 (tiga puluh enam) kegiatan.

c. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi.

Indikator kinerja program ada 3 (tiga) yaitu:

- 1.) Persentase akses aman air minum perkotaan.
Pada tahun 2019 tingkat capaian 100,78%, capaian melebihi target semula 86,15% dengan capaian 86,82%, dikarenakan meningkatnya minat penduduk untuk memperoleh akses air minum.
- 2.) Persentase akses aman air minum perdesaan.
Capaian tahun 2019 mencapai angka 76,71% melebihi target yang semula hanya 76,30% dengan tingkat ketercapaian 100,54%, dikarenakan meningkatnya minat penduduk untuk memperoleh akses air minum.
- 3.) Persentase akses sanitasi air limbah domestik.
Capaian tahun 2019 89,57% melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun senilai 83,50%, dikarenakan bertambahnya penduduk yang memiliki akses sanitasi.

Ketiga indikator kinerja program memenuhi target capaian didapatkan dari realisasi 3 (tiga) kegiatan yaitu: Peningkatan Sarana Prasarana air minum; Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS; Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan.

Indikator database jalan, jembatan, dan keciptakaryaannya pada Renja 2020 merupakan indikator baru sesuai yang termaktub didalam RPJMD 2018 -2023.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan:

- 1.) Kegiatan sudah direncanakan dengan baik;
 - 2.) Waktu pelaksanaan selalu terkontrol dengan baik;
 - 3.) Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu).
- b. Faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah:
- 1.) Indikator kinerja program meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor : bertambahnya panjang penanganan menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan;
 - 2.) indikator kinerja program Persentase akses aman air minum perkotaan dan pedesaan : meningkatnya minat penduduk untuk memperoleh akses air minum;
 - 3.) Indikator kinerja program Persentase akses sanitasi air limbah domestik : Jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi bertambah didalam.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD:
- a. Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor;
 - b. Kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik;
 - c. Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat;
 - d. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi tenaga kerja;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah peningkatan keselarasan proses perencanaan, kondisi lapangan, dan penganggaran.

Hasil reuiu tersebut dituangkan dalam tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan Pencapaian Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya s/d Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut,

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2020	
								Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	03	16		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan										
					a. Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik	92,50	89,60	90,20	90,69	100,54%	98,04%	90,80	90,71	99,90%
					b. Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik	90,30	85,80	86,70	86,73	100,03%	96,05%	87,60	86,83	99,12%
1	03	16	001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	97,89	95,90	96,33	96,38	100,05%	98,46%	96,46	96,41	99,95%
1	03	16	002	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	85,46	81,75	82,78	82,78	100,00%	96,86%	83,45	82,91	99,35%
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	88,33	84,80	86,45	86,55	100,12%	97,98%	86,61	86,56	99,94%
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	93,77	89,12	90,13	90,13	100,00%	96,12%	91,04	90,19	99,07%
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	84,41	79,75	81,71	81,82	100,13%	96,93%	81,94	81,84	99,88%
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	91,13	85,65	86,34	86,34	100,00%	94,74%	87,54	86,46	98,77%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	94,73	91,70	91,75	91,78	100,03%	96,89%	92,01	91,82	99,79%
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	96,05	88,10	89,91	89,91	100,00%	93,61%	91,45	90,14	98,57%
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	92,4	90,51	90,65	90,79	100,15%	98,26%	90,8	90,79	99,99%
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	93,6	89,10	90,74	90,74	100,00%	96,94%	91,45	90,81	99,30%
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	97,87	96,04	96,12	96,14	100,02%	98,23%	96,27	96,15	99,88%
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	94,85	90,25	91,73	91,73	100,00%	96,71%	92,51	91,80	99,23%
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	91,75	90,65	90,70	90,71	100,01%	98,87%	90,79	90,72	99,92%
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	83,6	79,21	80,86	80,86	100,00%	96,72%	81,55	80,91	99,22%
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	88,43	86,96	87,12	87,13	100,01%	98,53%	87,23	87,13	99,89%
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	86,09	81,45	83,37	83,37	100,00%	96,84%	84,05	83,41	99,24%
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	96,65	94,71	94,89	94,95	100,06%	98,24%	95,04	94,97	99,93%
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	88,44	83,62	84,74	84,74	100,00%	95,82%	85,67	84,83	99,02%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya selengkapnya disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut,

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional (%)	IKK (%)	Target Renstra PD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor		39,16	37,91	39,16	38,83	42,43	38,41	38,50	38,83	42,43	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat		41,84	40,18	41,84	41,27	46,11	40,79	40,83	41,27	46,11	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur		36,48	35,65	36,48	36,35	38,76	37,51	36,16	36,35	38,76	
2	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan		94,62	93,05	94,62	93,57	97,68	93,05	93,05	93,57	97,68	
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi		77,50	69,99	77,50	85,00	92,50	69,99	75,41	85,00	92,50	
3	Persentase panjang jalan yang dileger		97,05	96,30	97,05	96,94	99,02	96,30	96,30	96,94	99,02	
	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	13,33	100,00	100,00	
4	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik		90,80	90,20	90,80	91,10	92,00	90,69	90,71	91,10	92,00	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik		87,60	86,70	87,60	87,59	91,46	86,73	86,83	87,59	91,46	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang		96,46	96,33	96,46	96,87	97,47	96,38	96,41	96,87	97,47	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional (%)	IKK (%)	Target Renstra PD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang		83,45	82,78	83,45	83,68	84,79	82,78	82,91	83,68	84,79	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati		86,61	86,45	86,61	86,93	87,83	86,55	86,56	86,93	87,83	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati		91,04	90,13	91,04	90,88	92,86	90,13	90,19	90,88	92,86	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi		81,94	81,71	81,94	82,76	83,69	81,82	81,84	82,76	83,69	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi		87,54	86,34	87,54	88,03	89,93	86,34	86,46	88,03	89,93	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta		92,01	91,75	92,01	92,55	93,93	91,78	91,82	92,55	93,93	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta		91,45	89,91	91,45	91,63	94,52	89,91	90,14	91,63	94,52	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang		90,80	90,65	90,80	91,42	91,93	90,79	90,79	91,42	91,93	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang		91,45	90,74	91,45	91,18	92,88	90,74	90,81	91,18	92,88	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo		96,27	96,12	96,27	96,49	97,40	96,14	96,15	96,49	97,40	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo		92,51	91,73	92,51	92,40	94,07	91,73	91,80	92,40	94,07	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional (%)	IKK (%)	Target Renstra PD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap		90,79	90,70	90,79	90,86	91,47	90,71	90,72	90,86	91,47	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap		81,55	80,86	81,55	81,29	82,91	80,86	80,91	81,29	82,91	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal		87,23	87,12	87,23	87,31	88,08	87,13	87,13	87,31	88,08	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal		84,05	83,37	84,05	83,79	85,41	83,37	83,41	83,79	85,41	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan		95,04	94,89	95,04	95,24	96,18	94,95	94,97	95,24	96,18	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan		85,67	84,74	85,67	85,45	87,52	84,74	84,83	85,45	87,52	
5	Persentase akses aman air minum perkotaan		88,15	86,15	88,15	90,15	92,15	86,82	86,82	90,15	92,15	
	Persentase akses aman air minum perdesaan		78,05	76,30	78,05	79,80	81,55	76,71	76,71	79,80	81,55	
	Persentase akses sanitasi air limbah domestik		90,60	83,50	90,60	87,50	89,50	89,57	89,57	87,50	89,50	
	Persentase akses air minum perdesaan		-	-	-	79,80	81,55	-	-	79,80	81,55	
	Persentase akses air minum perkotaan		-	-	-	90,15	92,15	-	-	90,15	92,15	
6	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah		12,18	11,17	12,18	13,20	14,21	11,17	11,17	13,20	14,21	
	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar		-	-	-	12,90	14,21	-	-	12,90	14,21	
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi		11,86	9,71	11,86	14,13	16,54	9,71	9,71	14,13	16,54	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya antara lain:

- Perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.
- Pengoordinasian kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan permukiman dan bangunan gedung.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinergi Program

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selalu berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Kabupaten/Kota melalui kegiatan Musrenbangwil di Eks Karesidenan maupun Musrenbangprov serta dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Kegiatan Konferensi Regional dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
- Selain bersinergi terkait program juga dilaksanakan koordinasi terkait Ruas Jalan Menurut Fungsi Jalan Dan Status Jalan baik itu jalan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten sebagai bahan revisi SK Gubernur Jawa Tengah No. 620/2 Tahun 2016 tentang penetapan status ruas jalan sebagai jalan Provinsi Jawa Tengah. Penetapan fungsi dan status jalan mengacu pada Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Jalan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Sistem Transportasi, Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan dan Bandar Udara, serta kebijakan lainnya yang berskala nasional maupun internasional.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yaitu :

- Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas;
- Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif (kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan;
- Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai standar kapasitas sebagai jalan kolektor;
- Belum optimalnya cakupan pelayanan kualitas air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah;
- Masih perlunya peningkatan kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi serta ketersediaan informasi jasa konstruksi.

- Diperlukan dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan.
 - Pengawasan dan pemeliharaan jalan memerlukan SDM di bidang Teknis Jalan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional SPM / SDG's;
- Visi: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
 - Misi: Misi ke 3 (Tiga) yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima, menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.
 - Pencapaian MDG's: Tujuan ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan khususnya target 7D mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya ;
- a. Tantangan :
- Masih adanya ruas – ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis terkait dengan lebar, alinyemen, maupun struktur sesuai dengan standar jalan kolektor;
 - Masih kurangnya bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan untuk menjaga kualitas konstruksi dan layanan jalan;
 - Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun perdesaan;
 - Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan sebagaimana pedoman teknis yang berlaku;
 - Meningkatnya kebutuhan pelaku jasa konstruksi bersertifikasi.
- b. Peluang:
- 1.) *Internal (Strength)* meliputi,
- Penegakan hukum di bidang jalan yaitu :
 - Undang - Undang RI Nomor 38 Tentang Jalan;
 - Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Jalan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016.
 - Adanya dukungan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTR/K);
 - Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;

- Balai pengujian dan informasi konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium uji yang memadai;
- Balai Pelaksana Jalan memudahkan pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.
- Inovasi Teknologi bidang infrastruktur, perkerasan jalan (*rigid pavement*) dan penanganan konstruksi jalan berupa *cold milling*;

2.) Peluang *Eksternal*,

- Tersedia berbagai even di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi.
- Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah;
- Dukungan pemerintah pusat melalui DAK infrastruktur;

5. Formulasi Isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

Berangkat dari indentifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Jawa Tengah secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sarana pembangunan nasional. Perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan melalui penyusunan rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi dan atau alternatif yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya untuk penajaman rumusan Rancangan Renja PD.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah

Perbandingan antara RKPD 2021 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut,

- a. Nama Program pada rancangan awal usulan RKPD disusun berdasarkan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 mengenai Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi sehingga berbeda dengan RKPD 2021 yang disusun berdasarkan PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diterangkan dibawah:
 1. Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan; Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi; Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan pada RKPD 2021 menjadi satu program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan.
 2. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi

- berubah nama menjadi dua program yaitu,
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan;
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi menyesuaikan sehingga menjadi tiga program yaitu,
 - Program Penataan Bangunan Gedung
 - Program Penataan Bangunan Lingkungannya
 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 4. Rencana Awal RKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan Kegiatan Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat, Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik serta Program Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakarya dengan Kegiatan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi, Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah mengalami penyesuaian di RKPD Tahun 2021 menjadi satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
- b. Nama Kegiatan yang mengalami penyesuaian dengan PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 dalam RKPD Tahun 2021 sebagaimana berikut:
1. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana air minum dan Kegiatan Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS dilebur menjadi satu yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
 2. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan mengalami perubahan menjadi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
 3. Kegiatan Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah berubah nama menjadi Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
 4. Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi mengalami penyesuaian dengan program yang baru menjadi dua kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Indikator kegiatan keduanya adalah sama yaitu Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi.
- c Target capaian kegiatan pada RKPD 2021 yang mengalami penurunan dibandingkan rencana RKPD awal yang merupakan akibat kebijakan terkait Pandemi Covid-19 dengan dilakukannya pengurangan pagu indikatif dan meningkatnya kualitas struktur jalan sesuai standar jalan kolektor:
1. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat, target capaian awal adalah 44,24.% dalam RKPD

Tahun 2021 turun menjadi 41,27%.

2. Target capaian awal Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur sebesar 38.00.% menurun menjadi 36,35% pada RKPD Tahun 2021.
 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang dari target awal 97.05.% menjadi 90,28%.
 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang awalnya memiliki target capaian 92.41.% dan pada RKPD 2021 target capaiannya turun menjadi 91,3%.
 5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo target capaian pada rencana RKPD awal 96.93.% pada RKPD tahun 2021 menjadi 94,44%.
 6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta awal rencana RKPD target capaian 93.13.% menjadi lebih kecil pada RKPD tahun 2021 sebesar 92,09%.
 7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal target capaian pada rencana RKPD awal 87.72.% sedangkan target capaian menjadi 85,55%.
 8. Target capaian kegiatan diawal rencana RKPD Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 95.70.% target capaian pada RKPD tahun 2021 menjadi 90,34%.
 9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap memiliki target capaian awal 86,82% pada RKPD tahun 2021 target capaian menjadi 86,08%.
 10. Kegiatan Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat, Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah yang telah berubah menjadi Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi target capaian kegiatan rencana pada RKPD awal adalah 95.33.% menurun pada RKPD 2021 menjadi 93,57%. Pertimbangan yang diambil adalah dikarenakan sebagian besar alat berat masih dalam kondisi baik.
- d. Kegiatan pada RKPD 2021 yang mengalami kenaikan target capaian dibandingkan rencana RKPD awal:
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati target capaian awal perencanaan 87.32.% naik menjadi 88,9%. Hal ini dikarenakan meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor yang salah satunya disebabkan performa dari jalan beton/*rigid pavement* meningkat.
 2. Target capaian Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi semula 82.96.% menjadi 85,39%. Hal ini dikarenakan meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor yang salah satunya disebabkan performa dari jalan beton/*rigid pavement* meningkat.
 3. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan yang disesuaikan namanya menjadi Kegiatan Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional memiliki target capaian awal perencanaan 87,50% sedangkan pada RKPD Tahun 2021 naik menjadi 91,7% dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan layanan sanitasi.

- e. Nama kegiatan, indikator kegiatan dan target capaian baru akibat munculnya nama program baru sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 adalah:
- . Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang baru pada RKPD 2021 dan masuk dalam program yang baru yaitu Program Penataan Bangunan Lingkungannya dengan indikator kegiatan Persentase jumlah kompleks Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar. Target capaian untuk kegiatan ini pada tahun 2021 adalah 12,90%.
- f. Pagu anggaran indikatif setelah dilakukan analisa kebutuhan pada RKPD tahun 2021 mengalami penyesuaian di semua kegiatan dengan mempertimbangkan anggaran untuk pemulihan dampak Covid 19 yang semula pada rancangan awal RKPD total anggaran sebesar Rp1.855.443.194.000,00 menurun menjadi Rp 751.404.402.000,00. Kegiatan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mengalami penyesuaian dengan pertimbangan:
- 1) Pemulihan Dampak Covid 19;
 - 2) Program Unggulan RPJMD 2018-2023;
 - 3) Kegiatan yang merupakan komintmen Provinsi dengan Pusat dan/atau Kabupaten/Kota;

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disajikan dalam tabel 2.3 berikut beserta catatan penting mengenai alasan perubahan target capaian kegiatan.

Tabel 2.3.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
I	Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan				733.587.153.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				284.169.530.000	
1	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; PEKALONGAN; PURWOREJO; PEMALANG; MAGELANG; BATANG; BANJARNEGARA; PURBALINGGA; CILACAP; BREBES; TEMANGGUNG; WONOSOBO; TEGAL; BANYUMAS	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	44,24.%	300.793.411.000	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; PEKALONGAN; PURWOREJO; PEMALANG; MAGELANG; BATANG; BANJARNEGARA; PURBALINGGA; CILACAP; BREBES; TEMANGGUNG; WONOSOBO;	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	41,27%	116.634.278.000	Target capaian kegiatan menyesuaikan kebijakan terkait Pandemi Covid-19
2	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; SRAGEN; REMBANG; PATI; GROBOGAN	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	38.00.%	432.793.742.000	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; SRAGEN; REMBANG; PATI; GROBOGAN; DEMAK; KLATEN; KENDAL; WONOGIRI	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	36,35%	167.535.252.000	Target capaian kegiatan menyesuaikan kebijakan terkait Pandemi Covid-19

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
II	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi				256.275.277.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				145.505.986.000	
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; KOTA SEMARANG; SEMARANG	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	97,05.%	15.291.136.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; KOTA SEMARANG; SEMARANG	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	90,28%	11.646.140.000	Target capaian kegiatan menyesuaikan kebijakan terkait Pandemi Covid-19
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; REMBANG; PATI; KUDUS; JEPARA	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	87,32.%	31.127.403.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; REMBANG; PATI; KUDUS; JEPARA	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	88,90%	15.220.781.000	Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; GROBOGAN; SRAGEN; BLORA	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	82,96.%	37.153.045.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; GROBOGAN; SRAGEN; BLORA	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	85,39%	28.706.707.000	Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; MAGELANG; PURWOREJO; KEBUMEN	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	92,41.%	29.605.409.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; MAGELANG; PURWOREJO; KEBUMEN	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	91,30%	15.579.199.000	Target capaian kegiatan menyesuaikan kebijakan terkait Pandemi Covid-19

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; TEMANGGUNG; BANJARNEGARA; WONOSOBO	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	96.93.%	30.678.338.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; TEMANGGUNG; BANJARNEGARA; WONOSOBO	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	94,44%	14.215.045.000	Target capaian kegiatan menyesuaikan kebijakan terkait Pandemi Covid-19
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; KARANGANYAR; BOYOLALI; KLATEN; SUKOHARJO; WONOGIRI	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	93.13.%	37.923.633.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; KARANGANYAR; BOYOLALI; KLATEN; SUKOHARJO; WONOGIRI	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	92,09%	23.225.545.000	Target capaian kegiatan menyesuaikan kebijakan terkait Pandemi Covid-19
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; TEGAL; BREBES	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	87.72.%	38.364.826.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; TEGAL; BREBES	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	85,55%	13.663.210.000	Target capaian kegiatan menyesuaikan kebijakan terkait Pandemi Covid-19
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN; PEMALANG	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	95.70.%	36.131.487.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN; PEMALANG	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	90,34%	13.689.890.000	Target capaian kegiatan menyesuaikan kebijakan terkait Pandemi Covid-19
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	86,82%	28.400.823.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	86,08%	9.559.469.000	Target capaian kegiatan menyesuaikan kebijakan terkait Pandemi Covid-19

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
III	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				24.508.590.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			-	22.550.923.000	
	1 Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat, Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	Balai Pengujian dan Peralatan; KOTA SEMARANG	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	95.33.%	20.322.231.000	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Balai Pengujian dan Peralatan; KOTA SEMARANG	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	93,57%	19.150.027.000	Target capaian kegiatan menyesuaikan kebijakan terkait Pandemi Covid-19
	2 Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik	Balai Pengujian dan Peralatan; KOTA SEMARANG	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	85.00.%	4.186.359.000	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Balai Pengujian dan Peralatan; KOTA SEMARANG	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	85.00.%	3.400.896.000	
IV	Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan				441.633.361.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			-	138.741.973.000	
	1 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi, Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	100.00.%	437.979.161.000	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	100.00.%	138.741.973.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
V	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi				56.350.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			-	68.400.000.000	
1	Peningkatan Sarana Prasarana air minum	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung; PURWOREJO; KEBUMEN	Persentase akses aman air aman perkotaan	90.15.%	54.600.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung; PURWOREJO; KEBUMEN	Persentase akses air minum perkotaan	90.15.%	67.980.000.000	
2	Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Persentase akses aman air aman perdesaan	79.80.%	700.000.000		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Persentase akses air minum perdesaan	79.80.%	420.000.000	
	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				730.000.000	
3	Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	87.50.%	1.050.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	91,70%	730.000.000	Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan layanan sanitasi

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
VI	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan				314.687.990.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				89.235.000.000		
1	Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	13.20.%	313.674.480.000	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	13.20.%	89.235.000.000		
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA				701.480.000		
						Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	12,90%	701.480.000	Merupakan program dan kegiatan baru menyesuaikan PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019	
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.369.510.000		
2	Pembinaan Jasa Konstruksi dan Peningkatan Pelayanan Informasi	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	14.13.%	1.013.510.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	14.13.%	1.019.510.000		
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG			350.000.000		
					Total	1.855.443.194.000				Total	751.404.402.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah kegiatan yang berada di ruas jalan Provinsi, sehingga program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan di luar ruas jalan yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tidak dapat dilaksanakan. Para pemangku kepentingan tersebut mengajukan usulan melalui surat maupun melalui wadah berupa musrenbang provinsi. Kegiatan yang bisa ditampung hanyalah penanganan jalan/jembatan yang berada di ruas jalan provinsi dan keciptakaryaan sesuai kewenangannya.

Penelaahan usulan Kabupaten/Kota dan Masyarakat mempertimbangkan arahan Gubernur Jawa Tengah, hasil reses dan aspirasi DPRD Provinsi dituangkan dalam tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penanganan Jalan Sidareja - Cukangleues Kab. Cilacap	CILACAP	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Cilacap
2	Penanganan Jalan Buntu - Kroya - Slarang Kab. Cilacap	CILACAP	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Cilacap
3	Peningkatan Jalan Cilopadang - Salem Kab. Cilacap	CILACAP	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Cilacap
4	Peningkatan Jalan Menganti - Kesugihan Kab. Cilacap	CILACAP	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Cilacap
5	Pengadaan Tanah untuk Fly Over Jl. Ahmad Yani Ruas Buntu - Kroya - Slarang	CILACAP	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Cilacap
6	Pembangunan Jalur penyelamat bayeman (ruas jalan bobotsari - belik)	PURBALINGGA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Purbalingga
7	Pembangunan jembatan kali soso kec. bobotsari (ruas jalan purbalingga - bobotsari)	PURBALINGGA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Purbalingga
8	Pembangunan drainase jalan Mayjend. Sungkono (ruas jalan patung jenderal	PURBALINGGA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Purbalingga
9	Pembangunan SPAM dukuh Bantaran kelurahan Kalibenda kecamatan Sigaluh	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
10	Pembangunan SPAM desa Sirukem kecamatan Kalibening	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
11	Pembangunan SAB Sumur Bor Jombor Desa Kebanaran Kec Mandiraja	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
12	Pembangunan SAB dusun Beji Desa Karangtengah Kec Wanayasa	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
13	Pembangunan SAB dusun Diwek desa Karangkoobar Kec Karangkoobar	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
14	Pembangunan SAB dukuh prau bosok desa Jalatunda Kec Mandiraja	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
15	Pembangunan SAB dusun wandansari semayun gentan desa Gentasari Kec	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Pembangunan SAB desa Joho Kec Bawang	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
17	Pembangunan SAB desa gumelem Kec Susukan	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
18	Pembangunan SPAM desa Kaliajir	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
19	Pembangunan SPAM desa Kebanaran Kec Mandiraja	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
20	Pembangunan SPAM desa Talunamba Kec Madukara	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
21	Pembangunan SPAM desa paseh Kec Banjarmangu	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
22	pembangunan SPAM desa pekandangan kec Banjarmangu	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
23	Pembangunan SPAM desa wanadadi kec Wanadadi	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
24	Pembangunan SPAM desa semangkung kec Pejawaran	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
25	Pembangunan SPAM desa Sirongge Kec Pandanarum	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
26	Pembangunan SPAM desa gumingsir Kec Pagentan	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
27	Pembangunan SPAM desa Danakerta kec Punggelan	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
28	Pembangunan SPAM desa Pingit Rakit	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
29	Pembangunan SPAM kelurahan Wangon Kec Banjarnegara	BANJARNEGARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Banjarnegara
30	Pemeliharaan jalan Daendels untuk ruas jalan Wawar-Ayah (jalan non status)	KEBUMEN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	60 Km;	Kab. Kebumen
31	Peningkatan Jalan (kapasitas dan struktur) Kutoarjo - Batas kotas Purworejo	PURWOREJO	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	14 m; 3000 m;	Kab. Purworejo
32	Jalan lingkaran selatan Purworejo - Karangnongko/ Batas Prov DIY	PURWOREJO	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	12 m; 5000 m;	Kab. Purworejo
33	Jalan Kutoarjo - Prembun	PURWOREJO	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	14 m; 3000 m;	Kab. Purworejo
34	Jalan Maron - Purworejo	PURWOREJO	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	3000 m; 7 m;	Kab. Purworejo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	Jalan Kutoarjo - Bruno/ Batas Kabupaten Wonosobo	PURWOREJO	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	3000 m; 7 m;	Kab. Purworejo
36	Jalan Maron - Bener/ Batas kabupaten Magelang	PURWOREJO	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	3000 m; 7 m;	Kab. Purworejo
37	Jalan Purworejo - Sibolong	PURWOREJO	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	3000 m; 7 m;	Kab. Purworejo
38	Jalan kutoarjo - Ketawang	PURWOREJO	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	3000 m; 7 m;	Kab. Purworejo
39	Peningkatan Ruas Jalan Selokroo-Prembun	WONOSOBO	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	20 Km;	Kab. Wonosobo
40	Peningkatan Ruas Jalan Kertek-Purworejo	WONOSOBO	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	40 Km;	Kab. Wonosobo
41	Peningkatan Jalan Magelang-Sapuran	MAGELANG	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	10000 m;	Kab. Magelang
42	Peningkatan Jalan ruas Magelang-Purworejo	MAGELANG	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	10000 m;	Kab. Magelang
43	Peningkatan jalan ruas Magelang-Salatiga	MAGELANG	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	10000000 m;	Kab. Magelang
44	Peningkatan ruas jalan Boyolali-Jatinom (batas Kab. Klaten)	BOYOLALI	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	2 Km;	Kab. Boyolali
45	Penggantian Jembatan Tukuman	KLATEN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Unit;	Kab. Klaten
46	Peningkatan Jalan di Ruas jalan Wonogiri-Ngadirojo	WONOGIRI	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	3400 m;	Kab. Wonogiri
47	Peningkatan jalan di ruas jalan Ngadirojo-Biting	WONOGIRI	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	7500 m;	Kab. Wonogiri
48	Peningkatan jalan di ruas jalan Ngadirojo-Giriwoyo	WONOGIRI	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	12500 m;	Kab. Wonogiri
49	Peningkatan jalan di ruas jalan Wonogiri-Manyaran-Blimbing	WONOGIRI	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	8100 m;	Kab. Wonogiri
50	Peningkatan jalan di ruas jalan Wuryantoro-Eromoko-Pracimantoro	WONOGIRI	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	5000 m;	Kab. Wonogiri
51	Pembangunan Jembatan Nguter	WONOGIRI	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	50 m;	Kab. Wonogiri
52	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Surakarta 2	KARANGANYAR	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Karanganyar
53	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Purwodadi 2	KARANGANYAR	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Karanganyar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 2	KARANGANYAR	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	5 Paket;	Kab. Karanganyar
55	Pembangunan Jembatan Ganevo	SRAGEN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	140 m;	Kab. Sragen
56	Peningkatan Jalan Galeh-Ngrampal	SRAGEN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	20.29 Km;	Kab. Sragen
57	Peningkatan jalan Sidoharjo-Gabugan-Gemolong	SRAGEN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	21.60 Km;	Kab. Sragen
58	Peningkatan Jalan Sukowati (Sragen)	SRAGEN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	3.60 Km;	Kab. Sragen
59	Peningkatan jalan Sragen-Batujamus/Batas Kab.Karanganyar	SRAGEN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	12.97 Km;	Kab. Sragen
60	Peningkatan jalan pungkruk-palur karanganyar	SRAGEN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	2 Km;	Kab. Sragen
61	Peningkatan jalan pilangsari - mantingan	SRAGEN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	2 Km;	Kab. Sragen
62	peningkatan jalan pilangsari - batas kota timur	SRAGEN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Km;	Kab. Sragen
63	Peningkatan Jalan Gajahmada / Lingkar Selatan Purwodadi	GROBOGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Grobogan
64	Rehabilitasi Jembatan Ndelok Ruas Jalan Semarang - Godong	GROBOGAN	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Grobogan
65	Rehabilitasi Jembatan Ndelok Jalan Semarang - Godong	GROBOGAN	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Grobogan
66	Pembangunan Drainase Kota Gubug	GROBOGAN	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Grobogan
67	Pelebaran Jalan Godong - Purwodadi	GROBOGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Grobogan
68	Peningkatan Jalan Kuwu - Galeh	GROBOGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Grobogan
69	Peningkatan Jalan Purwodadi - Kudus	GROBOGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Grobogan
70	Peningkatan Jalan Purwodadi - Wirosari	GROBOGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Grobogan
71	Peningkatan Jalan Semarang - Godong	GROBOGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Grobogan
72	Peningkatan Jalan Wirosari - Kunduran	GROBOGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Grobogan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73	Peningkatan Jalan Purwodadi - Geyer	GROBOGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Grobogan
74	Peningkatan Jalan Wirosari - Sulur	GROBOGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Grobogan
75	Peningkatan Jalan Grobogan - Sukolilo	GROBOGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Grobogan
76	Peningkatan Jalan Singget - Doplang - Cepu	BLORA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	10 Km;	Kab. Blora
77	Peningkatan Jalan Kunduran - Ngawen - Blora	BLORA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	5 Km;	Kab. Blora
78	Peningkatan Jalan Todanan - Ngawen	BLORA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	10 Km;	Kab. Blora
79	Pembangunan Pagar TPA Cepu	BLORA	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	400 m;	Kab. Blora
80	Pembangunan Pagar TPA Blora	BLORA	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	400 m;	Kab. Blora
81	Pembangunan Jalan Kerja TPA Blora	BLORA	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	500 m;	Kab. Blora
82	Pembangunan Jalan Kerja TPA Cepu	BLORA	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	500 m;	Kab. Blora
83	Pengadaan Kendaraan Angkut L 300	BLORA	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	2 Unit;	Kab. Blora
84	Pengadaan Incinerator	BLORA	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	1 Unit;	Kab. Blora
85	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Lasem-Sale	REMBANG	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Rembang
86	Penataan Kawasan Perbatasan Jateng dan Jatim di Kecamatan Sarang dan Kecamatan	REMBANG	Jalan kondisi permukaan baik	2 Paket;	Kab. Rembang
87	Peningkatan Jalan Pati - Sukolilo - Bts. Kab. Grobogan	PATI	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	48076 m ² ;	Kab. Pati
88	Peningkatan Jalan Pati - Tayu - Bts. Kab. Jepara	PATI	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	48.076 m ² ;	Kab. Pati
89	Peningkatan Jalan Juwana - Todanan Kab. Pati/ Blora	PATI	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	47600 m ² ;	Kab. Pati
90	Pembangunan Median Jalan Bts. Jalan Ligkar Selatan Pati - Pati	PATI	Jalan kondisi permukaan baik	4900 m;	Kab. Pati
91	Pembangunan Drainase di Ruas Jalan Tayu - Jepara	PATI	Jalan kondisi permukaan baik	2000 m;	Kab. Pati

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
92	Peningkatan jalan Kudus - Margoyoso/ Bts Kab.Jepara	KUDUS	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Kudus
93	Rehabilitasi Jalan Kudus - Colo	KUDUS	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Kudus
94	Rehabilitasi Jalan Jati - Klambu/Bts Kab.Grobogan	KUDUS	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Kudus
95	Penataan Simpang jalan Kudus - Margoyoso/Bts Kab.Jepara	KUDUS	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Kudus
96	Peningkatan jalan Jati - Klambu/Bts Kab.Grobogan	KUDUS	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Kudus
97	Pembangunan Saluran Drainase dan trotoar Jl.Jati -Klambu bts Grobogan (Sempalan jati -	KUDUS	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Kudus
98	Pembangunan Saluran dan Trotoar Jl Lingkar Kudus -Bts Pati/Kudus (Pertigaan Bulung -	KUDUS	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Kudus
99	Pembangunan saluran Drainase dan Trotoar Jl Kudus - Colo (Panjang - Pruworejo)	KUDUS	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Kudus
100	Peningkatan Jl.Kudus - Bts Jepara /Margoyoso (Jember -Mijen)	KUDUS	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Kudus
101	Pelebaran Jalan Jati - Klambu/Bts Kab.Grobogan (Proliman tanjung - Undaan	KUDUS	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Kudus
102	Pembangunan Jembatan Sertokalangan (Sungai Wulan)	KUDUS	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Kudus
103	Pembangunan Jembatan Wilalung (Sungai Serang)	KUDUS	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Kudus
104	Pengadaan tanah ganti untung Jl, Lingkar Timur (Ngembal) - UMK	KUDUS	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Kudus
105	Pembangunan Sarana Air Minum Desa Kedungleper Kec. Bangsri Kab. Jepara	JEPARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Jepara
106	Pembangunan Sarana Air Minum Desa Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara	JEPARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Jepara
107	Pembangunan Sarana Air Minum Desa Bangsri Kec. bangsri Kab. Jepara	JEPARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Jepara
108	Pembangunan Sarana Air Minum Desa Pringtulis Kec. Nalumsari Kab. Jepara	JEPARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Jepara
109	Pembangunan Sarana Air Minum Desa Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara	JEPARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Jepara
110	Pembangunan Sarana Air Minum Desa Kelet Kec. Keling Kab. Jepara	JEPARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Jepara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
111	Pembangunan Sarana Air Minum Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara	JEPARA	Akses aman air aman perdesaan	1 Paket;	Kab. Jepara
112	Pembangunan IPAL Komunal Desa Kedungleper Kec. Bangsri Kab. Jepara	JEPARA	Akses sanitasi air limbah domestik	1 Paket;	Kab. Jepara
113	Pembangunan MCK Komunal Desa Mayong Lor Kec. Mayong Lor Kab. Jepara	JEPARA	Akses sanitasi air limbah domestik	1 Paket;	Kab. Jepara
114	Pembangunan IPAL Komunal Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara	JEPARA	Akses sanitasi air limbah domestik	1 Paket;	Kab. Jepara
115	Pembangunan IPAL Komunal Desa Karimunjava Kec. Karimunjava Kab. Jepara	JEPARA	Akses sanitasi air limbah domestik	1 Paket;	Kab. Jepara
116	Pelebaran Jalan Jepara-Keling	JEPARA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	38.32 Km;	Kab. Jepara
117	Pelebaran Jalan Gotri - Mayong (Bts. Kab. Kudus - Margoyoso)	JEPARA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	4 Km;	Kab. Jepara
118	Peningkatan drainase jalan provinsi Salatiga - Kedungjati (terkena dampak tol)	SEMARANG	Jalan kondisi permukaan baik	m3;	Kab. Semarang
119	Perubahan status jalan Salatiga-Banyubiru-Ambarawa menjadi jalan Provinsi	SEMARANG		1 Buah;	Kab. Semarang
120	Rehabilitasi Trotoar dan Saluran Jalan Pemuda Boja Kabupaten Kendal	KENDAL	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Kendal
121	Rehabilitasi Trotoar dan Saluran Jalan Raya Sukorejo Kabupaten Kendal	KENDAL	Jalan kondisi permukaan baik	1 Paket;	Kab. Kendal
122	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Cangkiran - Sukorejo - Plantungan Kabupaten	KENDAL	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Kendal
123	Pembangunan Talud Jalan Weleri - Patean Kabupaten Kendal	KENDAL	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Kendal
124	Pembangunan Talud Jalan Weleri - Patean	KENDAL	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Kendal
125	Pembangunan Flyover Perlintasan Kereta Api Sebidang Waru Lor Kecamatan Wiradesa Ruas	PEKALONGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Pekalongan
126	Peluasan Jalan di Ruas Jalan Kebonagung - Talun	PEKALONGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Pekalongan
127	Pengeprasan Jalan Ruas Wiradesa-Paninggaran di depan IAIN Pekalongan Desa	PEKALONGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Pekalongan
128	Pembangunan Jembatan "SIBELIS" Ruas Jalan Kajen - Paninggaran	PEKALONGAN	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Pekalongan
129	Pelebaran Jalan Provinsi Pertigaan Tuwel - Pertigaan Guci	TEGAL	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Km;	Kab. Tegal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
130	Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem	BREBES	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	3 Km;	Kab. Brebes
131	Peningkatan Jalan Bumiayu - Bantarkawung - Salem	BREBES	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	10 Km;	Kab. Brebes
132	Peningkatan Jl. Lingkar Bandungsari Salem	BREBES	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	8.5 Km;	Kab. Brebes
133	Peningkatan Jl. Lingkar Bandungsari Salem	BREBES	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	Km;	Kab. Brebes
134	Pembangunan jembatan wadas gumantung tonjong	BREBES	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Brebes
135	Pembangunan jembatan plompong kalikeruh	BREBES	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kab. Brebes
136	Peningkatan Jalan Piere Tendean (Drainase dan Trotoar) Kelurahan Nusukan	KOTA SURAKARTA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1120 m;	Kota Surakarta
137	Peningkatan Jalan Tentara Pelajar	KOTA SURAKARTA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	2242 m;	Kota Surakarta
138	Peningkatan Jalan Kolonel Sugiyono (Drainase dan Trotoar)	KOTA SURAKARTA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1385 m;	Kota Surakarta
139	Peningkatan Jalan A. Yani	KOTA SURAKARTA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	2245 m;	Kota Surakarta
140	Peningkatan Viaduct gilingan Jl. A. Yani	KOTA SURAKARTA	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	1 Paket;	Kota Surakarta

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
141	Pembangunan Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api Fly Over Ganefo (Mranggen) Tahap 2	Ruas Semarang - Godong (Kab. Demak)	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	0,77 Km	Mendukung kawasan Kedungsepur dan mendukung Kawasan Industri Kendal
142	Pembangunan Ruas Jalan Alternatif Bandungsari - Salem Tahap 2	Kab. Brebes	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	3,00 Km	Relokasi pasca bencana
143	Pembangunan Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api Fly Over Kroya	Kab. Cilacap	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	0,65 Km	Mendukung kawasan Barlingmascakeb dan Kawasan Industri Cilacap
144	Peningkatan jalan menuju standar lebar minimal 7 meter sesuai perda no. 8 tahun 2016	Jalan Provinsi di Jawa Tengah	Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	69,47 Km	Mendukung Wilayah Pengembangan Bergasmalang, Kedungsepur dan Purwomanggung
145	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM Regional Keburejo)	Kab. Purworejo		1 Kegiatan	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat daerah
146	Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah	Kab. Magelang		1 Kegiatan	Mendukung KSPN Borobudur

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mendukung terhadap Kebijakan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengutamakan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kemandirian ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat terjaga sebagaimana tercermin pada sasaran pokok bidang ekonomi dan bidang sosial.
2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi.

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024 sesuai arahan utama Presiden RI sebagai berikut:

- 1.) Pembangunan Sumber Daya Manusia, prioritas utama diantaranya melalui kerjasama dengan talenta - talenta global dan industri serta penggunaan teknologi.
- 2.) Pembangunan Infrastruktur, prioritas utama diantaranya menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi; akses ke Kawasan wisata; mengembangkan lapangan kerja baru; akselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3.) Penyederhanaan regulasi.
- 4.) Penyederhanaan birokrasi, prioritas utama diantaranya penyederhanaan prosedur dan birokrasi, serta penataan/penyederhanaan eselonisasi.
- 5.) Transformasi ekonomi, prioritas utama diantaranya transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

Implementasi Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021 oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya meliputi:

- 1.) Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan menyediakan layanan dasar (*basic life access*), dalam hal ini fokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi.
- 2.) Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing dengan cara peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan guna mempermudah akses masyarakat.
- 3.) Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana yaitu dengan melakukan tindakan:
 - Meningkatkan prasarana jalan dan jembatan guna mendukung pengembangan destinasi prioritas di Jawa Tengah termasuk KSPN: Borobudur - Yogyakarta dskt, Solo - Sangiran dskt, Semarang - Karimunjawa dskt, Nusakambangan - Pangandaran dskt serta DPP: Nusakambangan - Baturaden, Semarang - Karimunjawa, Solo - Sangiran, Borobudur - Dieng, Tegal - Pekalongan dan Rembang - Blora.
 - Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi dan pembangunan perlintasan tidak sebidang dengan rel kereta api di *Fly Over* Ganevo.
 - Peningkatan sinergitas penanganan jalan provinsi, jalan nasional, kabupaten/kota dan desa sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi guna mendukung pengembangan angkutan umum massal aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung.
 - Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga, Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang, melalui koordinasi secara intensif sesuai kewenangannya dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- 4.) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan digitalisasi tata kelola pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam

rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang kebinamargaan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

3.2.1. Tujuan

Untuk mendukung pencapaian tujuan daerah dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor;
- b. Meningkatkan Pelayanan Keciptakarya: Air Minum, Sanitasi, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Kontruksi;
- c. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

3.2.2. Sasaran

Sasaran akan menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan, alokasi sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penetapan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor;
- b. Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik;
- c. Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat;
- d. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut,

Tabel 3.1.

**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor				
		Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	38,83
		Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	91,10
2	Meningkatkan Pelayanan Keciptakarya: Air Minum, Sanitasi, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Kontruksi				
		Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat	Persentase akses aman air minum perkotaan	%	90,15
			Persentase akses aman air minum perdesaan	%	79,80
			Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	87,50
			Persentase akses air minum perdesaan	%	79,80
			Persentase akses air minum perkotaan	%	90,15
		Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi			
			Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	13,20
			Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	12,90
			Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	14,13
3	Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah				
		Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Nilai kepuasan masyarakat	%	100,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP PD	%	78,97

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus kegiatan pada: Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi – Balai Pengelolaan Jalan; Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi – Bidang Pelaksana Jalan; Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi - Balai Pengujian dan Peralatan; Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi - Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan. Implementasi Program Penyelenggaraan Jalan adalah Peningkatkan kualitas (rekonstruksi) untuk penanganan jalan pasca bencana di Brebes Ruas Bandungsari -Salem - Bts.Kab.Brebes dan/atau kapasitas (pelebaran) jalan dan jembatan dengan penanganan ruas tuntas utamanya pada ruas jalan provinsi eks alih status dari jalan kewenangan kabupaten/kota, jalan akses menuju kawasan pariwisata (utamanya Solo – Sangiran – Jeparu/Karimunjawa dan Kawasan Dieng – Kawasan Borobudur) , jalan akses daerah konsentrasi kemiskinan tinggi dan ruas-ruas jalan strategis lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian 2021 Rasio Kinerja Jalan Provinsi sebagai Jalan Kolektor

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kab/Kota; Pembangunan JDU SPAM Regional (Bergas, Wosusokas, Petanglong, Keburejo); dan Perencanaan Teknis JDU SPAM Dadimuria; Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS di 30 kabupaten se-Jateng dan 1 kota Semarang.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

Fokus kegiatan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional dengan pembangunan Instalasi Pembuangan Limbah Terpadu & Instalasi Pembuangan Air Limbah skala permukiman di lintas kabupaten/kota meliputi 8 kabupaten terdiri dari Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Boyolali, Kudus, Wonogiri, Temanggung dan Pemalang.

d. Program Penataan Bangunan Gedung;

Fokus kegiatan pada Kegiatan Penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi yaitu Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Magelang.

e. Program Penataan Bangunan Lingkungannya

Fokus kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus kegiatan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan kegiatan penyelenggaraan system informasi jasa

konstruksi. Rencana tersebut dituangkan dalam tabel 4.1. sebagai berikut,

Tabel 4.1

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

Nama PD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021		Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Kelebihan		Hasil		Rp.	Volume			Rp.
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	38,83		42,43		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
										Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	91,10		92		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakarya yang termutakhirkan	100,00		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Rancang Bangun dan Peneewasan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Rancang Bangun dan Peneewasan
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	90,86		91,47		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	91,42		91,93		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	86,93		87,83		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	95,24		96,18		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	82,76		83,69		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	96,87		97,47		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	92,55		93,93		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	87,31		88,08		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	96,49		97,4		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	41,27		46,11		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	36,35		38,76		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jalan yang dileger	96,94		99,02		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya -	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	81,29		82,91		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	91,18		92,88		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	90,88		92,86		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	85,5		87,52		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	88,03		89,93		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021		Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Volume	Rp.			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	83,68		84,79		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	91,63		94,52		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	83,79		85,41		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonorebo	92,40		94,07		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonorebo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonorebo
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6					Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	93,57		97,68		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengujian dan Peralatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengujian dan Peralatan
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6					Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	85,00		92,5		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengujian dan Peralatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengujian dan Peralatan
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6							116,634,278,000	0			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Data Kondisi Jalan	1		1,829,405,000	1	1,256,691,000		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Data Kondisi Jembatan	1		703,250,000	1	227,245,000		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Jumlah bronjong	2090		2,102,028,000	4000	2,940,113,000		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	12		11,751,266,000	12	0		
	Pembangunan Flyover			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6							1,415,000,000	0	0		
	Pembangunan Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6							909,850,000	0	0		
	Penggantian Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6							1,594,806,000	0	0		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	14		8,187,315,000	4	745,000,000		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	2		224,070,000	2	237,630,000		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Jumlah Peralatan Kebinaamargaan bertambah	88		15,138,000,000	109	5,732,310,000		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Jumlah Peralatan Kebinaamargaan yang dipelihara	26		1,909,999,000	24	1,476,960,000		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Jumlah perhitungan LHR	1		725,470,000	1	432,847,000		
										Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	50		39,530,000	100	1,044,673,000		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Jumlah sertifikat hasil uji	800		499,526,000	750	389,396,000		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Jumlah unit Pemeliharaan	84		163,440,000	87	194,488,000		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Jumlah unit Penambahan	2		2,474,330,000	3	273,362,000		
	Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6				Luas lahan jalan dan jembatan yang dibebaskan	137335.11		77,417,747,000	5539	10,288,434,000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Pengelolaan Leger Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6			Panjang Jalan yang dileger	158.71		750,000,000	14.29	142,900,000			
										158.71		750,000,000	14.29	142,900,000			
								Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 2	2			20,050,000,000	0	0			
	Pembangunan Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	41,27	2		20,050,000,000	0	0			
								Panjang Pembangunan Jalan (Perlintasan Tidak Sebidang) di Wilayah timur 2	0.77			30,787,730,000	0	0			
	Pembangunan Flyover			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	36,35	0.77		30,787,730,000	0	0			
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1	76.596			3,671,682,000	72.97	0			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	90,86			3,671,682,000	0	0			
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2	72.983			4,271,307,000	69.98	0			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	90,86			4,271,307,000	0	0			
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1	118.677			5,841,765,000	114.48	0			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	91,42			5,841,765,000	0	0			
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2	130.95			8,048,250,000	163.8	0			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	91,42			8,048,250,000	0	0			
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1	143.33			6,967,350,000	137.08	0			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	86,93			6,967,350,000	0	0			
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2	124.57			6,100,695,000	120.62	0			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	86,93			6,100,695,000	0	0			
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1	158.6			7,210,500,000	156.37	0			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,24			7,210,500,000	0	0			
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	92.67			4,290,150,000	88.07	0			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,24			4,290,150,000	0	0			
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1	189.02			10,035,975,000	187.51	0			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	82,76			10,035,975,000	0	0			
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2	195.36			12,338,700,000	197.03	0			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	82,76			12,338,700,000	0	0			

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Volume	Rp.		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1	132.88			6,083,100,000	118.79	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	96,87			6,083,100,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2	87.48			3,981,600,000	80.88	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	96,87			3,981,600,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	189.435			8,949,075,000	189.34	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	92,55			8,949,075,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	235.29			10,646,550,000	233.8	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	92,55			10,646,550,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1	87.77			3,958,650,000	84.82	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	87,31			3,958,650,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2	99.72			4,592,400,000	96.72	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	87,31			4,592,400,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1	142.02			6,742,650,000	160.46	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	96,49			6,742,650,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	107.079			5,628,555,000	83.19	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	96,49			5,628,555,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 1	842.9			674,320,000	842.9	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	81,29			674,320,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 2	1177.7			942,160,000	1166.7	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	81,29			942,160,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 1	681.65			606,120,000	750.35	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	91,18			606,120,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 2	1353.83			1,083,064,000	1353.83	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	91,18			1,083,064,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 1	1245.8			996,640,000	1223.4	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	90,88			996,640,000	0	0		
								Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 2	1445.12			1,156,096,000	1432.97	0		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	90,88				1,156,096,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	1638.45			1,310,760,000	1620.95	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	85,5				1,310,760,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	1098.1			878,480,000	1079.7	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	85,5				878,480,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	1956.04			1,564,832,000	1892.54	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	88,03				1,564,832,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	1475			1,267,200,000	1545.9	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	88,03				1,267,200,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1	1204.8			963,840,000	1196.5	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	83,68				963,840,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2	772			617,600,000	767	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	83,68				617,600,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	1321.6			1,057,280,000	1304.5	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	91,63				1,057,280,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	3215.8			2,572,640,000	3178.2	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	91,63				2,572,640,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1	761.6			612,320,000	765.4	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	83,79				612,320,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2	1249.8			999,840,000	1249.8	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	83,79				999,840,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	1429.1			1,143,280,000	1420.1	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	92,40				1,143,280,000	0	0		
									Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	875.7			700,560,000	867.1	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	92,40				700,560,000	0	0		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1	76			12,964,500,000	0	0			
	Penggantian Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	41,27		12,964,500,000	0	0			
								Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 2	0			0	120	0			
	Penggantian Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	41,27		0	0	0			
								Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 1	109			20,100,000,000	91	0			
	Penggantian Jembatan							Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	36,35		20,100,000,000	0	0			
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6		Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1	1.3			10,479,128,000	16.8	0			
	Pelebaran Jalan Menuju Standar							Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	41,27		10,479,128,000	0	0			
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6		Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (DAK)	1.4			13,300,000,000	0	0			
	Pelebaran Jalan Menuju Standar							Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	41,27		13,300,000,000	0	0			
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6		Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 2	6			59,840,650,000	7.7	0			
	Pelebaran Jalan Menuju Standar							Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	41,27		59,840,650,000	0	0			
								Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 1	5.9			54,843,192,000	5.76	0			
	Rekonstruksi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	36,35		54,843,192,000	0	0			
								Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah timur 2	7.2			61,804,330,000	16.43	0			
	Pelebaran Jalan Menuju Standar			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	36,35		61,804,330,000	0	0			
								Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 1	0			0	1.25	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	86,93		0	0	0			
								Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 2	0			0	0.25	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	86,93		0	0	0			
								Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 1	0			0	0	0			

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Volume	Rp.			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,24				0	0	0		
												0	1.65	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,24				0	0	0		
												0.31	3,500,000,000	0.46	0		
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	82,76				3,500,000,000	0	0		
												0	0.88	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	82,76				0	0	0		
												0	0	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	96,87				0	0	0		
												0.2	2,000,000,000	0.4	0		
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tejal	%	87,31				2,000,000,000	0.4	0		
												0	1.2	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	91,42				0	0	0		
												0	7.05	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	91,42				0	0	0		
												0	0.2	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	96,49				0	0	0		
												0	0.05	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	96,49				0	0	0		
												0	3.08	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	90,86				0	0	0		
												0	4	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	90,86				0	0	0		
												0	0	0			

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Maerlang	%	91,42				0	0	0		
												0	4.5	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	86,93				0	0	0		
												0	3.51	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	86,93				0	0	0		
												0	3.53	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,24				0	0	0		
												0	2.15	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,24				0	0	0		
												0	0	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	88,03				0	0	0		
												0	4.35	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	88,03				0	0	0		
												0	1	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tejal	%	87,31				0	0	0		
												0	3	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tejal	%	87,31				0	0	0		
												0	2.5	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	96,49				0	0	0		
												0	2	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	96,49				0	0	0		
												0	0	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	81,29				0	0	0		
												0	11	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	81,29				0	0	0		
												0	21.6	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	90,88				0	0	0		
												0	12.15	0			

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	90,88			0	0	0			
												0	17,5	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	85,5			0	0	0			
												0	18,4	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	85,5			0	0	0			
												0	63,5	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	88,03			0	0	0			
												0	38,1	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	88,03			0	0	0			
												0	8,3	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	83,68			0	0	0			
												0	5	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	83,68			0	0	0			
												1,500,000,000	0	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	83,79			1,500,000,000	0	0			
												0	2	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	83,79			0	0	0			
												0	9	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	92,40			0	0	0			
												0	8,6	0			
	Rehabilitasi Jembatan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	92,40			0	0	0			
												0	0	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	91,42			0	0	0			
												0	3	0			
	Rehabilitasi Jalan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	91,42			0	0	0			
												0	2	0			
												0	0	0			

(1)	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Volume	Rp.		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6						68,400,000,000		2,250,000,000		
								Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun	3			3,617,560,000	2	2,250,000,000		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6						3,617,560,000	2	2,250,000,000		
								Jumlah kabupaten/kota terfasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas III	31			420,000,000	29	0		
	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi								31			420,000,000	0	0		
								Jumlah SPAM Regional	3			64,362,440,000	2	0		
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan											64,362,440,000	0	0		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6					Persentase akses sanitasi air limbah domestik	91.7	89.5		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6						730,000,000		1,110,000,000		
								Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan penembanaan teknis.	8			730,000,000	8	1,110,000,000		
	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik								8			730,000,000	8	1,110,000,000		
								Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	13.2				14.21		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6					Persentase jumlah kompleks Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	12.9	14.21		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6						119,235,000,000		312,431,810,000		
								Jumlah bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	16			155,000,000	16	160,000,000		
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6						155,000,000	16	160,000,000		
								Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	1			80,000,000	1	82,500,000		
	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6						80,000,000	1	82,500,000		
								Pembangunan Masjid	1			119,000,000,000	1	312,189,310,000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Volume	Rp.		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6				1			119,000,000,000	1	312,189,310,000		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	% 14.13						16.54		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Jasa Konstruksi
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6					Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	14.13	356,000,000		333,440,000		
								Focus Group Discussion	160			130,535,000	120	93,440,000		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6				160			130,535,000	120	93,440,000		
								Forum Jasa Konstruksi Daerah	100			47,265,000	100	80,000,000		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6				100			47,265,000	100	80,000,000		
								Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	160			663,510,000	160	663,510,000		
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6				160			663,510,000	160	663,510,000		
								Rakor TPJK Kab./Kota	120			88,200,000	120	80,000,000		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6				120			88,200,000	120	80,000,000		
								Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk pengguna jasa	80			45,000,000	80	40,000,000		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6				80			45,000,000	80	40,000,000		
								Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa	80			45,000,000	80	40,000,000		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6				80			45,000,000	80	40,000,000		
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6							350,000,000		388,000,000		
								Jumlah penerbitan HSPK	2			350,000,000	2	388,000,000		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi			Pertumbuhan Ekonomi	% 5,6				2			350,000,000	2	388,000,000		
								Nilai kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100				100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
								Nilai SAKIP PD	78.97				79.77		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
								Nilai kepuasan masyarakat	100				100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Jasa Konstruksi
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengujian dan Peralatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengujian dan Peralatan
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Volume	Rp.		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta
										Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
										Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Nilai SAKIP PD	%	78,97			510,000,000		460,000,000		
									Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	29	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	270,000,000	29	250,000,000	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Nilai SAKIP PD	%	78,97			270,000,000	29	250,000,000		
									Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	240,000,000	7	210,000,000	
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	Nilai SAKIP PD	%	78,97			240,000,000	7	210,000,000		
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan			Indeks Reformasi Birokrasi								117,505,564,000		292,278,000		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Jumlah Laporan Keuangan	19	Persentase ketercapaian	100	117,505,564,000	19	292,278,000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran									12			117,305,564,000	12	0	
										19			200,000,000	19	292,278,000	
X.XX.01.1.03	Administrasi Umum			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			1,183,283,000		1,545,451,000		
									Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2,160,000	12	2,335,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			2,160,000	12	2,335,000		
									Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2,820,000	12	3,049,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			2,820,000	12	3,049,000		
										12			2,820,000	12	3,049,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			2,820,000	12	3,049,000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja		
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		2,820,000	12	3,049,000			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2,932,000	12	3,170,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2,935,000	12	3,174,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2,935,000	12	3,174,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	3,120,000	12	3,373,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	3,120,000	12	3,373,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	3,180,000	12	3,439,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	3,180,000	12	3,439,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	3,200,000	12	3,461,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	3,200,000	12	3,461,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	3,360,000	12	3,633,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	3,360,000	12	3,633,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	20,160,000	12	20,160,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	20,160,000	12	20,160,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	16,640,000	12	21,632,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala <u>Perencanaan Gedung Kantor</u>			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	16,640,000	12	21,632,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala <u>Perencanaan Gedung Kantor</u>			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	21,127,000	12	27,465,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala <u>Perencanaan Gedung Kantor</u>			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	21,127,000	12	27,465,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala <u>Perencanaan Gedung Kantor</u>			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	23,163,000	12	30,050,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala <u>Perencanaan Gedung Kantor</u>			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	23,163,000	12	30,050,000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keukuran		Hasil		Rp.	Volume	Rp.		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	24,960,000	12	32,448,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			24,960,000	12	32,448,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			24,960,000	12	32,448,000		
								Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	27,164,000	12	35,314,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			27,164,000	12	35,314,000		
								Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	29,692,000	12	38,600,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			29,692,000	12	38,600,000		
								Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	33,753,000	12	43,879,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			33,753,000	12	43,879,000		
								Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	36,424,000	12	47,352,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			36,424,000	12	47,352,000		
								Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	47,840,000	12	62,192,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			47,840,000	12	62,192,000		
								Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	49,852,000	12	64,807,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			49,852,000	12	64,807,000		
								Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	273,600,000	12	324,480,000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja		
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perencanaan Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				273,600,000	12	324,480,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	256,056,000	12	291,561,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				85,755,000	12	97,646,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perencanaan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				170,301,000		193,915,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	283,321,000	12	311,653,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				105,310,000	12	115,890,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perencanaan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				178,011,000	12	195,763,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	312,708,000	12	343,978,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				103,843,000	12	114,207,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perencanaan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				208,865,000	12	229,771,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	326,079,000	12	252,732,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				98,465,000	12	72,757,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perencanaan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				227,614,000	12	179,975,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	348,300,000	12	0		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				99,485,000	12	0			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perencanaan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				248,815,000	12	0			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	416,652,000	12	458,317,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				186,852,000	12	205,537,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perencanaan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				229,800,000	12	252,780,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	434,841,000	12	478,325,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				133,716,000	12	146,895,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perencanaan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				301,125,000	12	331,430,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	478,885,000	12	526,773,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				153,522,000	12	170,522,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perencanaan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				325,363,000	12	356,251,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	534,022,000	12	587,424,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				193,440,000	12	212,784,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perencanaan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				340,582,000	12	374,640,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	548,025,000	12	602,827,000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keeluaran		Hasil		Rp.	Volume		Rp.			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		183,593,000	12	201,608,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		364,432,000	12	401,219,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	621,435,000	12	682,808,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		151,776,000	12	166,184,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		469,659,000	12	516,624,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2,826,590,000	12	2,956,123,000		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		1,301,890,000	12	1,278,953,000			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		390,600,000	12	429,660,000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		1,134,100,000	12	1,247,510,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	57,720,000	12	60,742,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		57,720,000	12	60,742,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	75,900,000	12	83,490,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		75,900,000	12	83,490,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	77,000,000	12	84,700,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		77,000,000	12	84,700,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	80,300,000	12	88,330,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		80,300,000	12	88,330,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	95,520,000	12	88,572,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		95,520,000	12	88,572,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	97,548,000	12	107,302,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		97,548,000	12	107,302,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	110,515,000	12	119,166,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		110,515,000	12	119,166,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	112,700,000	12	95,590,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		112,700,000	12	95,590,000			
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	114,500,000	12	110,715,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		114,500,000	12	110,715,000			

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		36,000,000	12	108,160,000		
										12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	500,000,000	12	973,440,000		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		500,000,000	12	973,440,000		
										12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	29,119,000	12	37,856,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				23,121,000		30,057,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		5,034,000	12	6,545,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		964	12	1,254,000		
										12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	39,985,000	12	51,981,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		35,574,000	12	46,246,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		3,091,000	12	4,018,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		1,320,000	12	1,717,000		
										12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	54,080,000	12	70,304,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		28,080,000	12	36,504,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		23,600,000	12	30,680,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		2,400,000	12	3,120,000		
										12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	55,244,000	12	71,818,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		26,208,000	12	34,070,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		26,457,000	12	34,394,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		2,579,000	12	3,354,000		
										12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	55,374,000	12	71,986,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		24,550,000	12	31,915,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		28,424,000	12	36,951,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		2,400,000	12	3,120,000		
										12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	57,109,000	12	74,242,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		21,319,000	12	27,714,000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja			
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			31,230,000	12	40,600,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			4,560,000	12	5,928,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			41,848,000	12	54,403,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			14,400,000	12	18,720,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78						12			1,760,000	12	2,288,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			63,191,000	12	0		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			35,200,000		0		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100						22,791,000		0		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			5,200,000	12	0		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			68,260,000	12	88,739,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			31,877,000	12	42,416,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			33,239,000	12	42,000,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			3,144,000	12	4,323,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			79,605,000	12	103,487,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			37,944,000	12	49,327,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			38,771,000	12	50,405,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			2,890,000	12	3,755,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			86,528,000	12	112,486,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			43,772,000	12	56,903,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			39,956,000	12	51,943,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			2,800,000	12	3,640,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			186,368,000	12	242,278,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			71,968,000	12	93,558,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			72,000,000	12	93,600,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			12			42,400,000	12	55,120,000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keeluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	72,448,000	12	73,746,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			47,091,000	12	47,934,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			25,357,000	12	25,812,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	150,000,000	12	253,094,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			50,000,000	12	119,454,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			100,000,000	12	133,640,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	1,210,000,000	12	1,029,000,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			650,000,000	12	529,000,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			560,000,000	12	500,000,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	196,597,000	12	206,997,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			79,497,000	12	86,400,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional											117,100,000	12	120,597,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	206,000,000	12	0			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			100,000,000	12	0			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			106,000,000	12	0			
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	206,990,000	12	356,725,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			100,000,000	12	250,164,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100			106,990,000	12	106,561,000			

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keeluaran		Hasil		Rp.	Volume	Rp.		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	219,437,000	12	285,000,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		100,000,000	12	125,563,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		119,437,000	12	159,437,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	226,500,000	12	328,800,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		100,000,000	12	191,500,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		111,500,000	12	122,300,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		15,000,000	12	15,000,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	235,432,000	12	248,785,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		100,000,000	12	123,785,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		125,432,000	12	115,000,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		10,000,000	12	10,000,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	244,800,000	12	195,800,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		100,000,000	12	50,000,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		124,800,000	12	125,800,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		20,000,000	12	20,000,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	254,860,000	12	416,718,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		100,000,000	12	200,000,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		114,860,000	12	166,718,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		40,000,000	12	50,000,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	318,568,000	12	944,065,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	%	100	12	Nilai kepuasan masyarakat		100,000,000	12	420,020,000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keeluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			143,568,000	12	194,965,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			75,000,000	12	329,080,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	6,840,000	12	12,330,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			6,840,000	12	12,330,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	12,480,000	12	22,497,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			12,480,000	12	22,497,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	12,600,000	12	22,713,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			12,600,000	12	22,713,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	15,000,000	12	27,040,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			15,000,000	12	27,040,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	15,840,000	12	39,370,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			15,840,000	12	39,370,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	16,200,000	12	29,203,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			16,200,000	12	29,203,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	16,500,000	12	29,744,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			16,500,000	12	29,744,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	16,500,000	12	29,744,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			16,500,000	12	29,744,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	18,300,000	12	32,988,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			18,300,000	12	32,988,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	20,250,000	12	36,504,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			20,250,000	12	36,504,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	21,060,000	12	37,964,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			21,060,000	12	37,964,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	200,000,000	12	270,400,000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 78	Nilai kepuasan masyarakat	% 100		12			200,000,000	12	270,400,000			
								Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	120,000,000	12	125,000,000			

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja		
				Uraian	Target	Capaian Program		Keeluaran		Hasil			Rp.	Volume			Rp.	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		120,000,000	12	125,000,000			
										Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	13	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	60,000,000	13	60,000,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		13		60,000,000	13	60,000,000			
										Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	37	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	1,111,500,000	9	1,801,500,000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		37		1,111,500,000	9	1,801,500,000			
										Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	65	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	1,702,375,000	333	1,736,700,000		
	Pengadaan Mebeleur			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		0		0	219	498,000,000			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		53		1,401,875,000	104	716,700,000			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		12		300,500,000	10	522,000,000			
X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100				50,000,000		50,000,000			
										Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/S eminar	195	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	50,000,000	15	50,000,000		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	Nilai kepuasan masyarakat	%	100		15		50,000,000	15	50,000,000			
												Total	887,885,544,000					

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dan target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Renstra lima tahun kedepan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Program dan Kegiatan sesuai Renja yang disusun harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam RPJP-D dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi jaringan jalan yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, perekat antar daerah/wilayah perbatasan provinsi, menumbuhkembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulant bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses pelayanan sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Jawa Tengah sesuai capaian indikator yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, amin.